

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam laporan keuangannya telah menerapkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Akuntansi di Badan Keuangan Daerah yaitu bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menerapkan SAP berbasis Akrual sejak tahun 2015, sesuai dengan PP No .71 Tahun 2010 dimana sebelumnya Kabupaten Lima Puluh Kota masih menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual.
2. Dengan diterapkannya PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual, maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyusun laporan keuangannya menggunakan 7 komponen penting, yaitu : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Lima Puluh Kota berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan terutama dalam hal informasi aset pemerintah. Tetapi dengan adanya beberapa kondisi permasalahan di Kabupaten Lima Puluh Kota seperti komitmen pemimpin, sumber daya manusia, teknologi informasi dan sistem akuntansi, serta permasalahan pada aset tetap. Sehingga penerapan ini dapat mempersulit staf pemda sehingga tujuan untuk mendapatkan laporan

keuangan yang akuntabilitas dan transparansi tersebut cukup sulit untuk dicapai.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih banyak keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian, antara lain :

1. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian dari Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga belum bisa mencerminkan hal-hal yang terkait secara jelas mengenai implementasi akuntansi berbasis akrual pada akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Pada penelitian ini hanya menggunakan sedikit narasumber dalam melakukan wawancara, sehingga pada objektivitasnya terkait dengan informasi bagaimana akuntansi berbasis akrual berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota masih kurang.

5.3 Saran

1. Untuk selanjutnya disarankan menggunakan objek penelitian lebih dari satu pemerintahan seperti yang dilakukan penulis saat ini, yaitu hanya berfokus pada pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebaiknya dapat meneliti lebih luas lagi dengan subjek penelitian mencakup beberapa pemerintahan kota/kabupaten di Sumatera Barat
2. Dalam melakukan penelitian dengan topik yang sama bisa menggunakan narasumber yang lebih banyak lagi agar bisa menghasilkan informasi yang lebih valid dan juga peneliti selanjutnya dapat mengganti atau menambah metode

yang dilakukan dalam pengambilan data seperti kuesioner ataupun metode lainnya.

